

## MODAL SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL (KASUS DI HTR KECAMATAN BATU AMPAR, KUTAI TIMUR)

Ana Zuraidah<sup>1</sup>, Mustofa Agung Sardjono<sup>2</sup>, Rujehan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Jalan Penajam, Samarinda 75123

<sup>2,3</sup> Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Jalan Penajam, Samarinda 75123  
E-Mail: [anazuraidah78@gmail.com](mailto:anazuraidah78@gmail.com)

Received: 29 Juni 2022. Accepted: 11 Agustus 2022

### ABSTRACT

By principle, social capital already exists in the community. The strength or the weakness of the social capital in supporting the development and the use of it for positive development depends on the characteristics of the community. The purpose of this study was to understand the local knowledge of the social capital of the community around the forest related to the Community Plantation Forests (HTR) program. The method employed was a survey with a semi-structured questionnaire and a modified questionnaire adopted from the Social Capital Assessment Tool (SCAT). The result showed that the community of the village studied had the potential of majority productive age; relatively high level of education (most of them had high school education); and relatively moderate income level. The residents were old settlers, dominated by local people, and the population was quite heterogeneous from diversified ethnicity, religion, and regional origin. Therefore, the social capital in the village was categorized as high. Thus, the community characteristics and the social capital in the villages should be able to support community-based forest management in a sustainable manner. This social capital should be managed and improved by the stakeholders to encourage individual and group independence and to minimize gaps, especially in Social Forestry (SF) development programs.

**Key words:** Forest, sustainable, social, community, local

### ABSTRAK

Pada prinsipnya modal sosial di masyarakat memang sudah ada, dan kuat lemahnya modal sosial dalam mendukung pembangunan tergantung dari karakteristik masyarakat dan pemanfaatan modal sosial untuk tujuan pembangunan ke arah yang positif. Tujuan dalam penelitian dilakukan untuk memahami pengetahuan lokal khususnya modal sosial masyarakat di sekitar hutan yang berhubungan dengan program perhutanan sosial khususnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Metode yang digunakan adalah survei dengan kuisioner semi-terstruktur. Modifikasi kuisioner mengadopsi dari *Social Capital Assesment Tool* (SCAT). Masyarakat di desa studi memiliki potensi dari sisi usia yang sebagian besar merupakan usia produktif dan tingkat pendidikan tergolong relatif tinggi. Tingkat pendapatan masyarakat masih tergolong sedang. Penduduk disana merupakan pemukim lama didominasi oleh masyarakat lokal dan berdasarkan perkembangan kependudukan cukup heterogen dari keragaman suku, agama dan asal daerah. Karakteristik masyarakat dan modal sosial di desa studi sudah seharusnya dapat berkontribusi dan mendukung terhadap kapasitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan modal sosial masyarakat desa studi masuk kategori tinggi. Modal sosial tersebut harus dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan serta harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terciptanya kemandirian individu maupun kelompok dan meminimalisasi kesenjangan khususnya dalam program pembangunan perhutanan sosial.

**Kata kunci:** Hutan, berkelanjutan, sosial, masyarakat, lokal

### PENDAHULUAN

Pada tahun 1990-an ada kewajiban pemegang konsesi kayu untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat (Bina Desa Hutan / BDH atau Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/PMDH), akan tetapi semua tindakan tersebut dianggap tidak cukup mensejahterakan masyarakat lokal. Pada tahun 1995 dipromosikan tiga skema yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan / HKm (Hutan Rakyat), Hutan Tanaman Rakyat / HTR (Perkebunan Pohon

Berbasis Masyarakat) dan Hutan Desa / HD (Hutan Desa). Namun, setelah lebih dari lima belas tahun implementasi masih menunjukkan kemajuan kesejahteraan masyarakat lokal belum banyak meningkat (Sardjono et al., 2013). Reformasi regulasi dianggap menjadi perkembangan positif di bidang kehutanan dalam hal pemberian hak kepada masyarakat lokal sumber daya hutan, akan tetapi penguasaan hutan masih menjadi masalah dalam hal siapa yang memegang kendali atas sumberdaya lahan dan

hutan (Siscawati et al., 2017). Perhutanan Sosial (PS) kontemporer di Indonesia bertanggung jawab kepada kelompok pengguna untuk pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan. Perhutanan sosial Indonesia berjanji untuk meningkatkan masyarakat kesejahteraan, mempromosikan pengelolaan hutan lestari, dan mengurangi lingkungan konflik (Erbaugh, 2019). Fenomena kegagalan pengelolaan hutan lestari di Indonesia menghadapi realitas pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak sesuai. keberhasilan atau kegagalan terbesar dari pengelolaan hutan adalah masyarakat sekitar hutan itu sendiri (Pambudi, 2020). Program Perhutanan Sosial (SFP=*social forestry program*) dianggap sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi degradasi, deforestasi, dan kemiskinan, dan berkontribusi pada program pengentasan kemiskinan nasional. SFP juga dengan mendukung program reforma agraria (TORA), dan merupakan komponen integral dari kebijakan pemerataan ekonomi oleh Pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2015 (Leonard, 2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial telah menetapkan bahwa skema PS terdiri dari Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA).

Pemerintah sendiri belum serius dalam penerapan PS. Pengaturan PS dengan kebijakan dan peraturan yang ada kadang-kadang masih terdapat efek kontradiktif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan tinjauan literatur dan data dari lapangan, masih menemukan bahwa terdapat konflik atas sumber daya, alokasi hak yang tidak lengkap, ketidaksejajaran antara aturan formal PS dan sistem pemerintahan lokal/daerah, dan aktor yang terlibat PS secara umum tidak efektif (Moeliono et al., 2017). Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah keniscayaan yang harus dijalankan pemerintah karena beberapa alasan. Pertama, di dalam dan sekitar kawasan hutan ada  $\pm 32.447.851$  jiwa, jumlah desa di dalam hutan  $\pm 2.037$  desa dan di sekitar hutan  $\pm 19.247$  desa. Kedua, sebagian besar masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Ketiga, sebagian besar luas wilayah Indonesia (63,04%) berupa hutan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah (Ekawati et al., 2020). Masyarakat harus memperoleh akses yang sebesar-besarnya dan insentif untuk mengelola usaha kehutanan sebagai sumber kehidupan sekaligus mencegah kerusakan (Pambudi, 2020). Masyarakat membutuhkan

tingkat modal sosial tertentu untuk pengelolaan hutan lestari. Karakteristik individu, pengetahuan prosedural pengelolaan hutan dan peran kelompok tani hutan perlu dipertimbangkan untuk pengelolaan hutan berdasarkan modal sosial (Lee et al., 2017).

Modal sosial harus dikembangkan lebih lanjut dalam pengelolaan HTR untuk mencapai manfaat optimal dari HTR. Selain itu, petani juga harus memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap norma sosial, tradisi, agama, dan aturan adat. Modal sosial yang dimiliki petani harus disikapi dengan tepat oleh pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan pengelolaan HTR yang berhasil (Sylviani et al., 2020). Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) belum memberikan hasil yang memuaskan. pembangunan HTR di Kawasan Hutan Produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial budaya dalam bentuk modal sosial masyarakat dalam proses pembangunan HTR (Saputro, 2012). Kasus di Indonesia menunjukkan bahwa karakteristik individu, pengetahuan prosedural pengelolaan hutan, dan peran kelompok masyarakat perlu dipertimbangkan untuk pengelolaan hutan berdasarkan modal sosial masyarakat hutan (Lee et al., 2017). Modal sosial harus ditangani secara tepat oleh pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan HTR yang sukses (Sylviani et al., 2020). Di Sumatera Barat, dukungan terhadap perhutanan sosial oleh pemerintah sudah sangat tinggi tetapi implementasinya kurang memperhatikan pengetahuan kekuatan lokal dan modal sosial (Asmin et al., 2019).

Di Batu Ampar terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yang diberikan kepada Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang. IUPHHK-HTR tersebut berada pada areal hutan produksi seluas  $\pm 3.225$  ha sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 10124/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/12/2019.

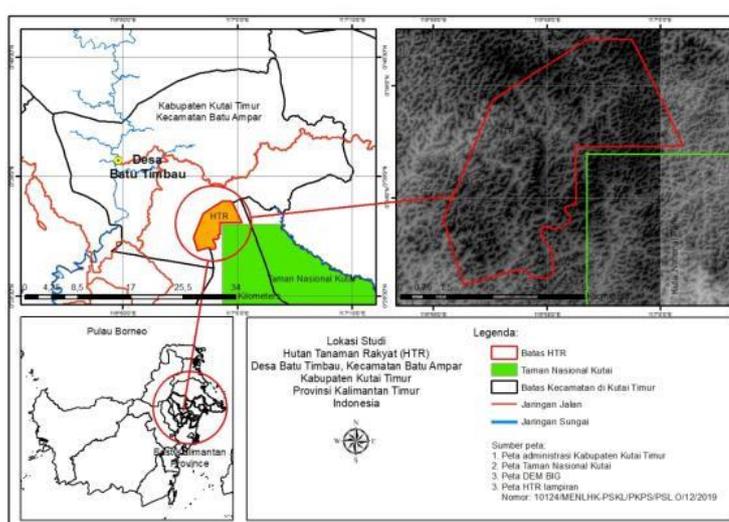
Kebijakan Perhutanan Sosial tersebut harus dapat diadaptasikan sesuai dengan kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan politik lokal. Karakteristik masyarakat sekitar hutan di berbagai daerah di Indonesia tidaklah seragam. Oleh karena itu, penting memahami dan melakukan penelitian terkait pengetahuan lokal khususnya modal sosial masyarakat di sekitar hutan yang berhubungan dengan program perhutanan sosial khususnya HTR. Di wilayah Kutai Timur tepatnya di Kecamatan Batu Ampar terdapat satu-satunya HTR yang sedang berjalan dan sudah beroperasi.

Dalam pembangunan HTR secara lestari sangat perlu memahami karakteristik masyarakat setempat dan modal sosial yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan program PS secara berkelanjutan, sehingga tujuan penelitian ini adalah memahami karakteristik individu dan memahami kondisi modal sosial masyarakat di Desa Batu Timbau di Kecamatan Batu Ampar. Masyarakat di desa tersebut sebagian besar adalah anggota koperasi HTR dan mereka merupakan masyarakat lokal.

## BAHAN DAN METODE

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur. Desa tersebut merupakan pemukiman penduduk lokal yang berada di pinggiran sungai Wahau dan menjadi ibukota kecamatan. Sedangkan areal HTR yang berjarak sekitar 17 km dari desa studi secara administrasi terletak di wilayah Kecamatan Batu Ampar dengan luas sebesar 3.225 ha yang berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional Kutai seperti dijelaskan (Gambar 1).



**Gambar 1.** Lokasi penelitian di HTR pada Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

### Prosedur Penelitian

#### Penetapan Fokus Penelitian

Penerapan fokus penelitian berfungsi dalam memenuhi kriteria-kriteria, atau masukan ketika menjelaskan data yang diperoleh di lapangan. Dalam rangka menjaga ketepatan penelitian dan fokus penelitian, maka batasan penelitian ini mengenai karakteristik individu/responden terdiri dari usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan lama tinggal. Kemudian lima unsur modal sosial yang terdiri dari:

#### 1) Kepercayaan (*Trust*),

Kepercayaan adalah harapan yang muncul dalam komunitas yang berperilaku secara teratur, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama (Fukuyama, 2000). Sub-unsur kepercayaan yang dinilai dalam penelitian ini terdiri dari lima, yaitu:

a. Kepercayaan terhadap instansi terkait seperti Pemerintah daerah, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPHP

- b. Kepercayaan terhadap pihak luar/perusahaan yang terkait HTR
- c. Kepercayaan terhadap pengurus koperasi
- d. Kepercayaan terhadap tokoh masyarakat
- e. Kepercayaan terhadap aturan adat dan peraturan terkait HTR

#### 2) Norma (*Norms*)

Norma adalah bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh aparat pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Norma terbentuk dari tradisi sejarah, tokoh kharismatik yang membangun tata cara bersikap dan berperilaku atau suatu kelompok masyarakat secara spontan bersama-sama menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kelompok (Fukuyama, 1995). Sub-unsur norma yang dinilai dalam penelitian ini terdiri dari lima, yaitu:

a. Adanya norma adat/sosial dalam masyarakat

- b. Ketaatan terhadap norma adat/sosial dan agama
  - c. Ketaatan terhadap norma kesopanan/kesusilaan yang ada
  - d. Ketaatan terhadap peraturan terkait HTR yang disepakati bersama dalam kelompok
  - e. Ketaatan terhadap aturan pemerintah terkait HTR
- 3) Jaringan sosial (*Social Networks*)  
Modal sosial dapat dilihat sebagai struktur dan kualitas jaringan sosial (Claridge, 2004). Jaringan sosial dapat terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kerjasama kepercayaan politik, agama, hubungan genealogis dan lain-lain (Robinson & Stubberud, 2011). Jaringan sosial dapat memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama (Onyx & Bullen, 2000). Sub-unsur jaringan sosial yang dinilai dalam penelitian ini terdiri dari lima, yaitu:
- a. Adanya ikatan kerjasama dengan perusahaan/pihak luar lainnya
  - b. Adanya ikatan kuat dalam kelembagaan seperti koperasi/kelompok tani
  - c. Keterbukaan dalam menjalin kerjasama antar sesama anggota koperasi
  - d. Keterbukaan dalam menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat
  - e. Keaktifan dalam melakukan hubungan/jaringan dalam kelompok/kelembagaan/koperasi
- 4) Tindakan proaktif (*Proactive action*)  
Modal sosial ditentukan oleh fungsinya dan bukan merupakan entitas tunggal tetapi variasi entitas yang berbeda. Modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara individu dan antara individu dalam lembaga (Dasgupta & Serageldin, 2000). Salah satu unsur penting lainnya modal sosial adalah keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat (Hasbullah, 2006). Sub-unsur tindakan proaktif yang dinilai dalam penelitian ini terdiri dari lima, yaitu:
- a. Keinginan berbagi informasi terkait HTR dan koperasi
  - b. Keinginan menjaga keamanan bersama
  - c. Keinginan membersihkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan
  - d. Partisipasi warga mendukung pembangunan untuk kepentingan bersama
  - e. Keaktifan dalam menyelesaikan masalah atau konflik
- 5) Kepedulian (*Concern*).

Modal sosial selalu bercirikan saling tukar kebaikan (*reciprocity*) antar individu dalam suatu kelompok ataupun antar kelompok dalam suatu masyarakat. Pada masyarakat atau pada kelompok sosial yang memiliki bobot resiprositas kuat, akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial tinggi (kuat). Hal tersebut menggambarkan dengan tingginya tingkat kepedulian sosial, sikap saling membantu, saling menghormati dan saling memperhatikan satu sama lain. Berdasarkan hasil penilaian terhadap sub\_unsur kepedulian dapat diketahui masyarakat batu Timbau memiliki sikap saling membantu dan solidaritas yang baik. Sub-unsur kepedulian yang dinilai dalam penelitian ini terdiri dari lima, yaitu:

- a. Kepedulian terhadap sesama warga atau anggota koperasi
- b. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan
- c. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar seperti gotong royong dan lainnya
- d. Kepedulian terhadap HTR
- e. Kepedulian terhadap pengembangan kelembagaan koperasi

#### *Pengumpulan Data*

Penelitian ini menerapkan metode survei dengan kuisioner semi-terstruktur. Modifikasi kuisioner tersebut mengadopsi dari *Social Capital Assesment Tool* atau SCAT (Krishna & Shrader, 1999) dan *Social Capital Integrated Questionnaire* atau SC-IQ (Grootaert, 2003). Kuisioner tersebut ditargetkan pada masyarakat setempat atau sekitar HTR yang tergabung dalam koperasi.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data berupa dokumen atau laporan dan hasil penelitian terdahulu, data peta, data demografi Desa Batu Timbau dan Kecamatan Batu Ampar, serta data penunjang lainnya sesuai keperluan penelitian. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari Responden. Data yang diperoleh tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Jumlah sampel minimal menggunakan Rumus Slovin ((Asra & Prasetyo, 2015); Sevilla, 1992). Besar kecilnya sampel/responden didasarkan pada populasi yang telah diketahui yaitu populasi Desa Batu Timbau sebanyak 1.830 jiwa dengan menggunakan tingkat ketelitian 8%, maka diketahui jumlah sampel minimal sebesar 143,96. Dari jumlah minimal tersebut ditetapkan sebanyak 150 responden untuk meningkatkan keterwakilan dalam penelitian ini.

## Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan untuk analisis data adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai karakteristik individu dan unsur-unsur modal sosial. Penilaian karakteristik individu, dan hubungannya didasarkan terutama pada data hasil kuisioner yang menggunakan versi modifikasi dari kuesioner Krishna & Shrader (1999) dan Grootaert (2003). Modal sosial yang dimiliki komunitas masyarakat dikategorikan sesuai dengan (Uphoff, 2000) yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan modal sosial, yaitu minimum, rendah, sedang, dan tinggi dengan perhitungan selang nilai sebagai berikut:

$$\text{Selang nilai} = (X_{\text{maks}} - X_{\text{min}}) / N$$

Keterangan:

X maks = Nilai maksimum (penjumlahan semua nilai maks unsur modal sosial)

X min = Nilai minimum (penjumlahan semua nilai min unsur modal sosial)

N = Jumlah kategori tingkatan (karakteristik individu 3 kelas dan unsur modal sosial 4 kelas)

Berdasarkan penilaian diketahui selang nilai kepercayaan dengan  $X_{\text{max}}=15$ ,  $X_{\text{min}}=6$  dan  $n=4$  adalah 2 sehingga tingkat untuk masing-masing unsur modal sosial tersebut dibagi menjadi:

- Tingkat minimum jika skor < 7
- Tingkat rendah jika skor 7 s/d 9
- Tingkat sedang jika skor 10 s/d 12
- Tingkat kepercayaan tinggi jika skor > 12

Selanjutnya selang nilai dari 150 responden dengan  $X_{\text{max}} = 12$  dan  $X_{\text{min}} = 4$  dan jumlah kelas 3 (rendah, sedang dan tinggi) adalah sebesar 2,67. Berdasarkan selang nilai atau lebar kelas tersebut maka tingkatan karakteristik individu untuk masyarakat desa studi sebagai berikut:

- Karakteristik individu tinggi > 10,33
- Karakteristik individu sedang 8,67 – 10,33
- Karakteristik individu rendah < 8,67

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Batu Timbau sebelum tahun 1999 merupakan bagian dari Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal. Setelah pemekaran Kabupaten Kutai Timur tahun 1999 desa tersebut menjadi ibukota Kecamatan Batu Ampar dan telah memiliki lima kali (periode) kepala desa. Setelah perusahaan HPH PT. Kiani Lestari tidak aktif lagi sejak tahun 2010, sebagian masyarakat di Batu Timbau ada yang pulang ke daerah

masing-masing, ada yang menetap dan bekerja di perusahaan sawit, bekerja di perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), menjadi petani, nelayan dan lain-lain. Desa Batu Timbau cocok untuk pertanian dan peternakan yang ketinggian wilayahnya berada diatas kurang lebih 100 sampai 300 m dpl dengan suhu rata-rata 22-27°C dengan curah hujan hampir merata setiap tahunnya (Bappedda Kutim, 2017). Desa Batu Timbau mempunyai luas wilayah 10.066,75 ha dengan jumlah penduduk 1.830 jiwa yang terdiri laki – laki 947 orang dan perempuan 883 orang dengan jumlah kepala keluarga 506 KK dan jumlah dusun sebanyak 5 Rukun Tetangga sebanyak 11 (BPS Kutim, 2020). Desa tersebut merupakan Ibukota Kecamatan Batu Ampar yang sebagian besar penduduk disana adalah pemukim asli, yaitu dari suku Kutai. Selain sebagai pusat pemerintahan kecamatan juga sebagai pusat ekonomi dan desa tertua di kecamatan tersebut serta memiliki jumlah penduduk yang tinggi disbanding desa lainnya di Batu Ampar. Berdasarkan informasi saat survey lahirnya koperasi pemegang IUPHHK-HTR berasal dari masyarakat lokal desa tersebut.

Koperasi Produksi Bersama Timbau Menamang merupakan Lembaga yang memagang ijin IUPHHK-HTR di Kecamatan Batu Ampar. Koperasi tersebut berkedudukan atau memiliki kesekretariatan di Desa Batu Timbau dan anggota koperasi juga sebagian besar merupakan warga lokal di desa tersebut. Berdasarkan hasil survey dan pengakuan kepala adat kecamatan menjelaskan bahwa lahan untuk HTR tersebut dulunya sebelum pemekaran wilayah merupakan lahan adat masyarakat suku Kutai. Lahan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang berada di luar ijin konsesi IUPHHK-HT. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) HTR tersebut dalam pembangunan HTR terdapat perencanaan pemanfaatan dan pemungutan hasil budidaya tanaman yang dicanangkan seluas 2.236 ha untuk tanaman produksi, 335 ha untuk tanaman endemik, 334 ha untuk tanaman agroforestry, dan 262 ha untuk tanaman tumpang sari. Kemudian terdapat perencanaan untuk Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Kegiatan untuk konservasi terdiri dari pengayaan jenis lokal dan Menambah jenis-jenis tanaman kehidupan sebagai sumber pakan fauna setempat. Kegiatan perencanaan untuk perlindungan dan pengamanan hutan terdapat jenis kegiatan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pembentukan regu pengaman dan Perlindungan kawasan hutan

tanaman rakyat, dan Pembuatan jalur pengaman.

### Karakteristik Individu

Masyarakat Desa Batu Timbau terdiri dari beberapa suku bangsa yang didominasi oleh Suku Kutai yang berasal dari daerah Muara Bengkal dan Muara Ancalong dan mereka telah bermukim puluhan tahun disana. Suku lainnya yang juga sudah menetap di desa tersebut adalah Jawa, Toraja, Batak, Bima, dan Bugis. Masyarakat

disana telah hidup berdampingan secara rukun, damai, dan saling menghargai satu sama lain sekalipun mereka memiliki perbedaan suku bangsa, asal daerah, dan kepercayaan. Berdasarkan data 150 Responden diketahui sekitar 86,7% sudah bermukim di desa tersebut di atas 15 tahun (Tabel 1), hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat disana sebagian besar merupakan pemukim asli yang sebagian besar adalah penduduk setempat.

**Tabel 1.** Tingkat karakteristik individu responden dari lima indikator dengan masing-masing tiga variabel

| Karakteristik responden | Kategori                        | Tingkatan | Jumlah responden | Persentase (%) |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|
| Usia (thn)              | < 30                            | Rendah    | 4                | 2,7            |
|                         | 30 - 50                         | Sedang    | 81               | 54,0           |
|                         | > 50                            | Tinggi    | 65               | 43,3           |
| Pendidikan formal       | Sekolah dasar (SD)              | Rendah    | 37               | 24,7           |
|                         | SMP/sedejarat                   | Sedang    | 31               | 20,7           |
|                         | SMA/ sederajat/ atau di atasnya | Tinggi    | 82               | 54,7           |
| Pendapatan (Rupiah)     | < 1,5                           | Rendah    | 15               | 10,0           |
|                         | 1,5 - 3                         | Sedang    | 121              | 80,7           |
|                         | > 3                             | Tinggi    | 14               | 9,3            |
| Lama tinggal (thn)      | < 5                             | Rendah    | 7                | 4,7            |
|                         | 5 - 15                          | Sedang    | 13               | 8,7            |
|                         | > 15                            | Tinggi    | 130              | 86,7           |

Berdasarkan ketentuan usia produktif yaitu 15-64 tahun, maka diketahui terdapat sekitar 91% anggota koperasi merupakan usia produktif dan sisanya sekitar 9% merupakan usia non produktif. Dalam keanggotaan koperasi juga telah melibatkan pemangku adat, tokoh masyarakat, anak muda. Berdasarkan hal tersebut koperasi sudah cukup mengakomodir berbagai kalangan masyarakat di Desa Batu Timbau dan telah mewakili masyarakat walaupun tidak semua warga masyarakat masuk dalam keanggotaan koperasi. Tingkat Pendidikan Responden pada Tabel 1 di atas menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat dengan kategori tinggi atau sebagian besar telah berpendidikan sekolah menengah atas (SMA). Di Desa tersebut telah terdapat sarana pendidikan di yaitu pendidikan anak usia Dini (taman kanak – kanak) antara lain TK. Lestari yang merupakan Yayasan PT. Kiani Lestari, TK. Dharma Mulya yang merupakan Yayasan perorangan dan TK. Tunas Bangsa sebagai TK. Negeri, sedangkan SD Negeri terdapat 2 Unit dan SMP Negeri terdapat 1 Unit, dan SMA Negeri terdapat 1 unit. Pendidikan Non Formal seperti TK dan TPA ada 4 Unit yang biasanya dalam proses belajar mengajarnya memakai fasilitas Mesjid dan Mushola.

Tingkat pendapatan responden atau masyarakat Batu Timbau yang diwakili oleh

anggota koperasi tergolong sedang yaitu berkisar 1,5 sampai 3 juta rupiah per bulan atau sekitar 80% masyarakat disana memiliki tingkat pendapatan sedang. Meskipun sudah didukung oleh usia yang produktif dan tingkat pendidikan yang cukup belum tentu sejalan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Masyarakat disana umumnya masyarakat yang dulunya bekerja di sektor swasta/perusahaan akan tetapi semenjak HPH PT. Kiani Lestari tidak aktif sebagian besar masyarakat kembali bertani atau berkebun. Saat ini sudah terdapat perusahaan HTI dan perkebunan kelapa sawit akan tetapi warga yang bekerja disana hanya sebagian kecil. Adanya usaha-usaha koperasi melalui kegiatan di HTR sudah seharusnya tingkat pendapatan masyarakat ke depan akan semakin baik, karena sebagian besar anggota koperasi berasal dari warga desa tersebut.

Rata-rata tingkat karakteristik individu berdasarkan penilaian pada sebesar 10,03 (8,67 – 10,33) yang berarti termasuk dalam kategori sedang (Tabel 2). Hal tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan pada responden atau masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun pengelolaan HTR melalui koperasi. Dari empat indikator karakteristik individu terdapat pendidikan formal dan pendapatan yang relatif masih rendah. Hal

tersebut dapat ditingkatkan seiring berjalanya pembangunan HTR dan tentunya harus didukung oleh pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait dalam rangka memberikan bimbingan dan program di masyarakat secara berkelanjutan yang

berhubungan dengan pendidikan dan upaya-upaya kegiatan yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan usaha-usaha yang sudah direncanakan dalam pembangunan HTR disana.

**Tabel 2.** Hasil Penilaian Skor Rata-rata Responden

| No.    | Karakteristik Individu | Skor  | Rata-rata skor |
|--------|------------------------|-------|----------------|
| 1      | Umur                   | 405   | 2,70           |
| 2      | Pendidikan formal      | 347   | 2,31           |
| 3      | Pendapatan             | 331   | 2,21           |
| 4      | Lama tinggal           | 421   | 2,81           |
| Jumlah |                        | 1.504 | 10,03          |

Penilaian karakteristik individu telah menjadi penting karena tingkat karakteristik individu sangat berpengaruh terhadap tingkat modal manusia. Sementara diketahui bahwasanya modal manusia merupakan salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan suatu pembangunan termasuk pembangunan perhutanan sosial. Hal serupa pernah dikemukakan oleh Fukuyama (2000) dan Coleman (1998) yang menyatakan bahwa modal manusia dalam bentuk pendidikan dan ketrampilan justru lebih mendominasi dalam menentukan keberhasilan pembangunan dibandingkan modal yang berwujud fisik seperti teknologi, tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya. Menurut hasil penelitian Saputro (2012) menjelaskan bahwa karakteristik individu seperti tingkat pendidikan formal dan tingkat pendapatan berkorelasi positif dengan modal sosial dalam pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komiring Ilir (Saputro, 2012).

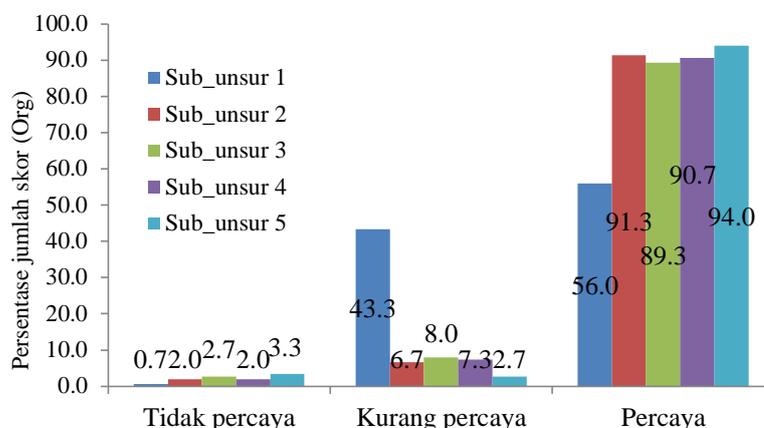
**Modal Sosial Masyarakat**

Modal sosial (*social capital*) sangat penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi (Miguel, 2003). Modal sosial telah menjadi suatu

syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan manusia, ekonomi, sosial-budaya, politik, dan stabilitas demokrasi (Haridison, 2013). Isu-isu permasalahan modal sosial terkait pembangunan sangat banyak dan harus dipelajari serta dikembangkan (Westlund & Larsson, 2016). Modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial seperti kepercayaan, norma, jaringan, tindakan proaktif dan kepedulian. Kelima unsur modal sosial tersebut dijadikan penilaian dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan pembangunan HTR.

**Kepercayaan**

Berdasarkan lima sub\_ unsur yang dinilai yaitu (i) kepercayaan terhadap instansi terkait seperti Pemerintah daerah, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPHP, (ii) kepercayaan terhadap pihak luar/perusahaan yang terkait HTR, (iii) kepercayaan terhadap pengurus koperasi, (iv) kepercayaan terhadap tokoh masyarakat, dan (v) kepercayaan terhadap aturan adat dan peraturan terkait HTR telah menunjukkan masyarakat di desa studi masih memiliki kepercayaan terhadap lima sub\_ unsur yang dinilai (Gambar 2).



**Gambar 2.** Grafik tingkat kepercayaan (persen) responden berdasarkan jumlah skor

Sebaran tingkat kepercayaan masuk pada kategori di atas 56% pada semua sub\_ unsur dan nilai terendah pada sub\_ unsur kepercayaan terhadap instansi terkait seperti Pemerintah

daerah, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPHP. Secara umum masyarakat di desa studi memiliki kepercayaan kepada kepengurusan koperasi, tokoh masyarakat, perusahaan mitra atau Bapak

angkat koperasi dan percaya terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat atau peraturan terkait HTR. Masyarakat sangat berharap dan mempercayakan keberadaan HTR kepada pihak terkait. Kehadiran HTR di Batu Timbau belum dapat dirasakan atau mendukung tingkat pendapatan akan tetapi mereka percaya program HTR tersebut ke depan akan membawa perubahan khususnya kesejahteraan masyarakat di desa studi. Program-program HTR disana berdasarkan survey lapangan diketahui baru mulai beroperasi sejak

tahun 2021 dengan kegiatan yaitu penanaman tanaman produksi jenis *Eucalyptus pellita* dan tahun 2022 kegiatan *land clearing* untuk persiapan lahan agroforestry (Gambar 3).

Berdasarkan kegiatan tersebut, maka HTR belum memiliki sumber pendapatan bagi anggota koperasi atau masyarakat di desa studi. Hal tersebut yang telah menjadi program HTR dan adanya kegiatan di lapangan telah mempengaruhi Responden sehingga memiliki kepercayaan terkait program maupun pembangunan HTR tersebut.



**Gambar 3.** Tanaman Produksi HTR (a); *Land Clearing* Areal HTR (b)

Dari 150 Responden sebagian besar menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap lima sub\_ unsur yang dinilai dengan jumlah rata-rata skor sebesar 14,01 atau kategori tinggi (> 12). Hasil penilaian memperlihatkan terdapat tiga sub\_ unsur yang memperoleh jumlah skor tinggi dengan

persentase jumlah Responden diatas 90% yaitu kepercayaan terhadap aturan adat dan peraturan terkait HTR, kepercayaan terhadap tokoh masyarakat, dan kepercayaan terhadap pihak perusahaan yang terkait HTR.

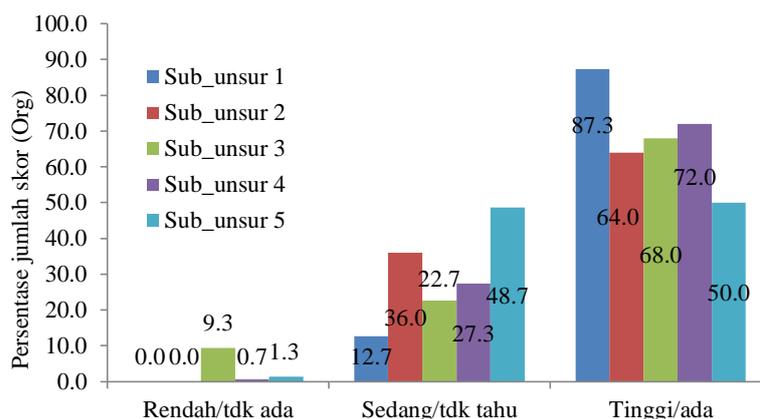
**Tabel 3.** Sebaran tingkat kepercayaan

| No.    | Tingkat | Selang Nilai | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|--------|---------|--------------|------------------|----------------|
| 1      | Minimum | < 7          | 1                | 0,67           |
| 2      | Rendah  | 7 - 9        | 4                | 2,67           |
| 3      | Sedang  | 10 - 12      | 9                | 6,00           |
| 4      | Tinggi  | > 12         | 136              | 90,67          |
| Jumlah |         |              | 150              | 100,00         |

### Norma

Berdasarkan lima sub\_ unsur yang dinilai yaitu (i) adanya norma adat/sosial dalam masyarakat, (ii) ketaatan terhadap norma adat/sosial dan agama, (iii) ketaatan terhadap norma kesopanan/kesusilaan yang ada, (iv) ketaatan terhadap peraturan terkait HTR yang disepakati

bersama dalam kelompok, dan (v) ketaatan terhadap aturan pemerintah terkait HTR telah menunjukkan masyarakat di desa studi sebagian besar masih mentaati dan menghormati terhadap nilai-nilai atau norma yang berlaku baik formal maupun non formal (Gambar 4).



**Gambar 4.** Grafik tingkat norma (persen) responden berdasarkan jumlah skor

Sebaran tingkatan norma pada masyarakat disana diketahui di atas 50% berada pada kategori tinggi dari 150 responden. Kepatuhan atau ketaatan terhadap norma di dalam masyarakat atau individu dapat bersifat dinamis tergantung kondisi dan karakteristik individu. Sehingga wajar apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran terkait norma yang berlaku, seperti dalam penelitian ini ditemukan sekitar 23% kategori sedang dan 8% kategori rendah (Tabel 4). Secara umum tingkatan norma masuk katogori tinggi pada masyarakat Batu Timbau, hal tersebut sangat penting dalam hal mendukung kelembagaan dan pembangunan HTR melalui koperasi. Norma

tersebut harus terpelihara dan ditingkatkan sehingga sejalan dalam mendukung program pembangunan di desa maupun program pembangunan HTR yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 150 Responden diperoleh jumlah rata-rata skor sebesar 13,28 atau norma masuk kategori tinggi (> 12). Hasil penilaian memperlihatkan terdapat dua sub\_unsur norma yang memperoleh jumlah skor paling tinggi yang menjadi perhatian yaitu adanya norma adat/sosial dalam masyarakat dan ketaatan terhadap peraturan terkait HTR yang disepakati bersama dalam kelompok.

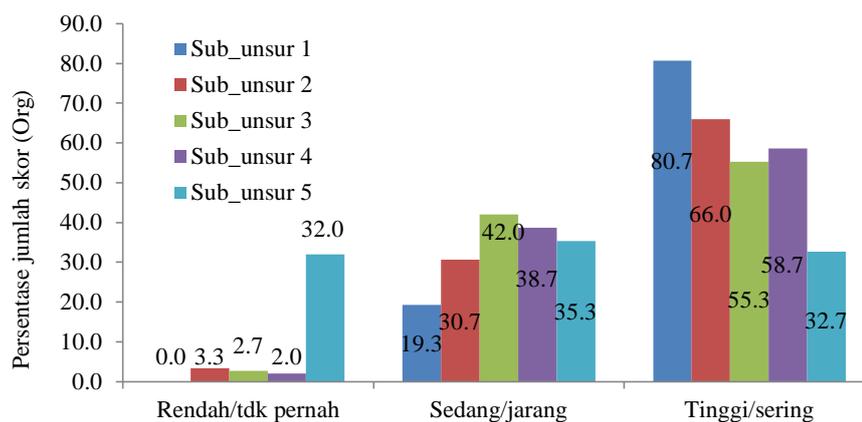
**Tabel 4.** Sebaran tingkat norma

| No.    | Tingkat | Selang Nilai | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|--------|---------|--------------|------------------|----------------|
| 1      | Minimum | < 7          | 0                | 0,00           |
| 2      | Rendah  | 7 - 9        | 13               | 8,67           |
| 3      | Sedang  | 10 - 12      | 35               | 23,33          |
| 4      | Tinggi  | > 12         | 102              | 68,00          |
| Jumlah |         |              | 150              | 100            |

**Jaringan Sosial**

Berdasarkan lima sub\_unsur yang dinilai yaitu (i) adanya ikatan kerjasama dengan perusahaan/pihak luar lainnya, (ii) adanya ikatan kuat dalam kelembagaan seperti koperasi/kelompok tani, (iii) keterbukaan dalam menajlin kerjasama antar sesama anggota koperasi, (iv) keterbukaan dalam menajlin kerjasama

dengan tokoh masyarakat, dan (v) keaktifan dalam melakukan hubungan/jaringan dalam kelompok/kelembagaan/koperasi, kelima sub tersebut telah menunjukkan masyarakat di desa studi sebagian sebaran persentase di kategori sedang dan sebagian besar lagi di kategori tinggi atau sering (Gambar 5).



**Gambar 5.** Grafik tingkat jaringan sosial (persen) responden berdasarkan jumlah skor

Persentase sebaran tingkatan jaringan sosial yang masuk dalam kategori tinggi sekitar 55%, kecuali sub\_unsur keaktifan dalam melakukan hubungan/jaringan dalam kelompok/kelembagaan/koperasi dengan persentase dibawah 55%. Dari hasil penilaian terdapat dua

hal yang perlu diperhatikan secara khusus yaitu keterbukaan sesama anggota koperasi dan pengurus koperasi. Peningkatan kerjasama dalam hal peningkatan komunikasi dan keaktifan anggota/masyarakat dalam kelembagaan.

**Tabel 5.** Sebaran tingkat jaringan sosial

| No.    | Tingkat | Selang Nilai | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|--------|---------|--------------|------------------|----------------|
| 1      | Minimum | < 7          | 2                | 1,33           |
| 2      | Rendah  | 7 - 9        | 18               | 12,00          |
| 3      | Sedang  | 10 - 12      | 43               | 28,67          |
| 4      | Tinggi  | > 12         | 87               | 58,00          |
| Jumlah |         |              | 150              | 100            |

Pada Tabel 5 tersebut menunjukkan 87 Responden menjawab tinggi dengan jumlah rata-rata skor sebesar 12,50 atau kategori tinggi (> 12). Sub\_unsur yaitu adanya ikatan kerjasama dengan perusahaan/pihak luar lainnya memiliki persentase tertinggi dibanding empat sub\_unsur lainnya. Meskipun masuk kategori tinggi keempat sub\_unsur tersebut sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan dalam jaringan sosial, sehingga dalam pelaksanaan program-program pembangunan HTR ke depan tidak menimbulkan persoalan terkait hubungan sosial ataupun interaksi sosial yang berujung pada perselisihan dalam hubungan kelembagaan atau hubungan bermasyarakat.

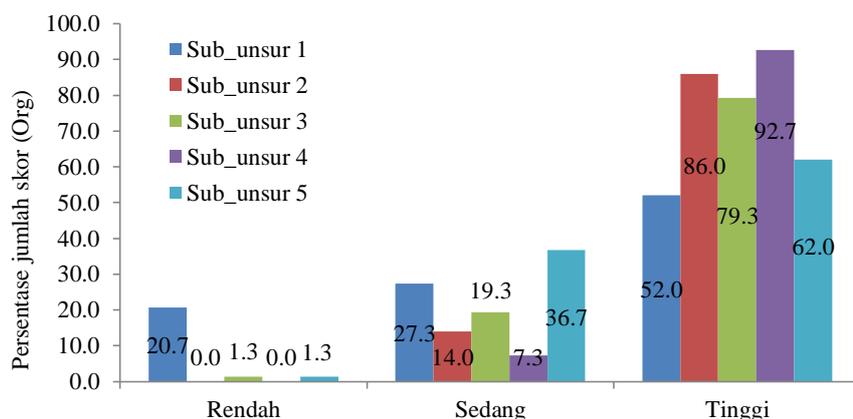
Modal sosial mulai dilihat sebagai unsur penting dalam pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Banyak studi tentang pembangunan perdesaan telah menunjukkan bahwa jaringan sosial dapat meningkatkan pembangunan seperti infrastruktur fisik dan teknologi tepat guna (Putnam, 1995). Lemahnya modal sosial di masyarakat atau jaringan kelembagaan lebih sering disebabkan karena tidak dipakai atau modal

sosial tidak dipergunakan (Coleman, 1994). Di desa studi menunjukkan jaringan sosial di masyarakat sudah ada dan cukup kuat seperti adanya kerjasama, ikatan kelembagaan dalam koperasi dan komunikasi dalam kelembagaan. Beberapa hal memang masih menunjukkan kelemahan dalam hasil penilaian seperti keaktifan masyarakat dalam kelembagaan dan keterbukaan dalam kegiatan di kelembagaan, akan tetapi hal tersebut dapat ditingkatkan seiring perkembangan kelembagaan dan adanya pembinaan berkelanjutan dari *stakeholder* terkait.

#### Tindakan Proaktif

Berdasarkan lima sub\_unsur yang dinilai yaitu (i) keinginan berbagi informasi terkait HTR dan koperasi, (ii) keinginan menjaga keamanan bersama, (iii) keinginan membersihkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan, (iv) partisipasi warga mendukung pembangunan untuk kepentingan bersama, dan (v) keaktifan dalam menyelesaikan masalah atau konflik, kelima sub tersebut telah menunjukkan masyarakat di desa studi sebagian sebaran persentase di kategori

sedang dan sebagian besar lagi di kategori tinggi atau sering (Gambar 6).



**Gambar 6.** Grafik tingkat tindakan proaktif (persen) responden berdasarkan jumlah skor

Keaktifan dan sikap kritis masyarakat dalam hal ini harus dibangun ke arah yang positif khususnya yang berkaitan dengan rencana pembangunan HTR. Dari 150 Responden dan lima sub\_unsur tindakan proaktif diketahui terdapat 112 responden masuk kategori tinggi dengan jumlah rata-rata skor sebesar 13,48 (Tabel 6) atau kategori tinggi (> 12). Keinginan membersihkan lingkungan tempat tinggal, keinginan menjaga keamanan bersama, dan lingkungan dan partisipasi warga mendukung pembangunan untuk kepentingan bersama merupakan tiga sub\_unsur dengan persentase tertinggi. Dua sub\_unsur lainnya juga tinggi tetapi tidak lebih dari 70%. Masyarakat di desa studi

merupakan masyarakat pedesaan yang masih memelihara semangat gotong royong dalam kegiatan di masyarakat dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Nilai-nilai tersebut jarang sekali ditemukan pada masyarakat perkotaan dan masyarakat yang heterogen. Tindakan proaktif yang positif dan tinggi di desa studi harus tetap dipelihara dan ditingkatkan dalam rangka mendukung program-program pembangunan HTR. Pengurus kelembagaan koperasi dan instansi pemerintah terkait pembangunan HTR harus memperhatikan nilai-nilai yang dimiliki di masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan HTR secara berkelanjutan.

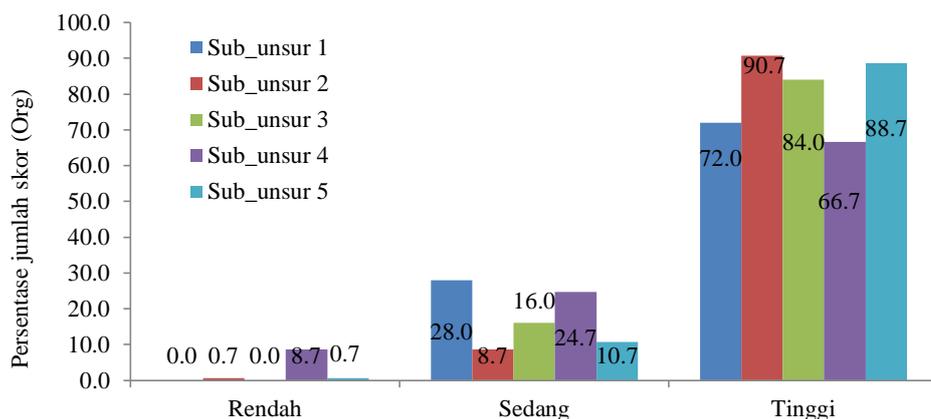
**Tabel 6.** Sebaran tingkat tindakan proaktif

| No.    | Tingkat | Selang nilai | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|--------|---------|--------------|------------------|----------------|
| 1      | Minimum | < 7          | 0                | 0,00           |
| 2      | Rendah  | 7 - 9        | 6                | 4,00           |
| 3      | Sedang  | 10 - 12      | 32               | 21,33          |
| 4      | Tinggi  | > 12         | 112              | 74,67          |
| Jumlah |         |              | 150              | 100,00         |

**Kepedulian**

Berdasarkan lima sub\_unsur yang dinilai yaitu (i) kepedulian terhadap sesama warga atau anggota koperasi, (ii) kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, (iii) kepedulian terhadap lingkungan sekitar seperti gotong royong dan

lainnya, (iv) kepedulian terhadap HTR, dan (v) kepedulian terhadap pengembangan kelembagaan koperasi, kelima sub tersebut telah menunjukkan bahwa masyarakat di desa studi sebagian besar sebaran persentase di kategori tinggi (Gambar 7).



**Gambar 7.** Grafik tingkat kepedulian (persen) responden berdasarkan jumlah skor

Hasil penilaian terhadap kepedulian Responden memiliki jumlah rata-rata skor sebesar 13,92 (Tabel 7) atau kategori tinggi (> 12). Hal tersebut membuktikan masyarakat disana masih memiliki sikap peduli tinggi terhadap sesama dan lingkungannya yang dapat menjadi modal besar di

masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan termasuk dalam pengembangan kelembagaan koperasi HTR dan usaha-usaha HTR yang sesuai semangat perhutanan sosial dengan lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hutan.

**Tabel 7.** Sebaran tingkat kepedulian

| No.    | Tingkat | Selang nilai | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|--------|---------|--------------|------------------|----------------|
| 1      | Minimum | < 7          | 0                | 0,00           |
| 2      | Rendah  | 7 - 9        | 4                | 2,67           |
| 3      | Sedang  | 10 - 12      | 19               | 12,67          |
| 4      | Tinggi  | > 12         | 127              | 84,67          |
| Jumlah |         |              | 150              | 100,00         |

Dari lima sub\_unsur kepedulian terdapat tiga yang memiliki persentase di atas 80%, yaitu kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kepedulian terhadap pengembangan kelembagaan koperasi, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar seperti gotong royong dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut pada prinsipnya masyarakat menunjukkan kepedulian yang tinggi terkait HTR akan tetapi dari unsur jaringan sosial khususnya keaktifan masyarakat dan keterbukaan komunikasi dan informasi terkait HTR masih menjadi kendala. Kedua hal tersebut harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengurus koperasi dan instansi terkait agar dapat meningkatkan keaktifan masyarakat dalam kelembagaan dan membangun keterbukaan dalam komunikasi dan arus informasi. Modal sosial utama pada masyarakat di desa studi merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang memang sudah ada dan masih terpelihara dengan baik, hal tersebut harus dimanfaatkan dalam konteks pembangunan HTR.

Modal sosial dalam suatu komunitas dapat berkontribusi pada kapasitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan (Lee et al., 2017). Konsep modal sosial merupakan konsep yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kinerja Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) karena konsep ini dinilai mampu menjelaskan fenomena sosio-ekonomis dan sosio-ekologis secara menyeluruh (Asmin, 2018). Berdasarkan penelitian Sylviani, et al. (2020) menyatakan bahwa penguatan modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan akan mendorong terciptanya kemandirian individu maupun kelompok. Namun, kesenjangan akan juga terjadi jika modal sosial yang ada tidak terpelihara secara baik, bahkan dapat menjadi penghalang atau pembatas dalam mengelola HTR. Modal sosial yang dimiliki masyarakat harus ditangani dan diperhitungkan dengan tepat oleh pemerintah dalam rangka perkembangan HTR. Modal sosial secara substansial dipengaruhi oleh pengetahuan tentang *Community Forest Management (CFM)* dan peran masyarakat sekitar hutan (Sylviani et al., 2020). Keberhasilan pembangunan hutan tanaman rakyat perlu mencakup modal sosial sebagai faktor kesiapan masyarakat untuk menerima suatu program pembangunan (Saputro, 2012).

## KESIMPULAN

Masyarakat di desa studi memiliki potensi dari sisi usia produktif dan tingkat pendidikan untuk

mendukung program pembangunan HTR. Masyarakat disana sebagian besar masih berpenghasilan sedang dan mereka merupakan penduduk asli yang telah bermukim diatas lima belas tahun. Saat ini kondisi masyarakat cukup heterogen berdasarkan suku, agama dan asal daerah. Karakteristik masyarakat dan modal sosial di desa studi sudah seharusnya dapat berkontribusi dan mendukung terhadap kapasitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan atau perhutanan sosial. Pada prinsipnya modal sosial di desa studi memang sudah ada dan hasil penelitian menunjukkan lima unsur modal sosial yaitu kepercayaan, norma, jaringan sosial, tindakan proaktif, dan kepedulian di masyarakat masuk kategori tinggi. Modal sosial utama seperti kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat, kepercayaan terhadap sesama warga, ketaatan terhadap norma yang masih berlaku di masyarakat, dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang memang sudah ada di masyarakat harus dijaga dan dilestarikan seiring berkembangnya pembangunan sehingga tidak hilang di masyarakat pedesaan. Dari semua sub\_ unsur modal sosial terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu keaktifan masyarakat dalam kelembagaan dan keterbukaan dalam komunikasi atau kerjasama terkait HTR. Kedua hal tersebut merupakan jaringan sosial dan unsur penting dalam modal sosial. Modal sosial tersebut harus tetap ditingkatkan dan harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terciptanya kemandirian individu maupun kelompok dan meminimalisasi kesenjangan khususnya dalam program pembangunan HTR secara berkelanjutan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada kepala adat Kecamatan Batu Ampar yang telah menerima dan mengizinkan penelitian ini dilakukan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak camat Batu Ampar, Kepala Desa Batu Timbau serta masyarakat/anggota koperasi yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Penelitian ini penuh dengan tantangan baik secara aksesibilitas maupun secara emosional karena daerah studi merupakan daerah pedalaman dan berbagai persoalan yang peneliti temui khususnya terkait program HTR disana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, F., Darusman, D., Ichwandi, I., Suharjo, D. (2019). Mainstreaming community-based forest management in West Sumatra: Social forestry arguments, support, and implementation. *Forest and Society*, 3(1), 77-96. doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v3i1.4047>, Diakses pada 19 Januari 2019.
- Asra, A., dan Prasetyo, A. (2015). Pengambilan sampel dalam penelitian survei: Jakarta: Rajawali Pers.
- Bappedda Kutim. (2017). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2017-2023.
- BPS Kutim. (2020). Kecamatan Batu Ampar Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur, Sangatta
- Claridge, T. 2004. Social capital and natural resource management. Thesis, University of Queensland, Brisbane, Australia.
- Coleman, J. C. (1994). Dasar-Dasar Teori Sosial: Referensi bagi Reformasi, Restorasi dan Revolusi. Judul asli: Foundations of Social Theory. In: The Belknap Press of Harvard University.
- Dasgupta, P., dan Serageldin, I. (2000). Social capital: a multifaceted perspective: World Bank Publications.
- Ekawati, S., Suharti, S., & Anwar, S. (2020). Membangun Bersama Perhutanan Sosial. Bogor: IPB Press.
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy Economics*, 109, 102019.
- Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. Orbis: New York: Free Press, 40(2), 457 pp.
- Fukuyama, F. (2000). Social capital and civil society. International Monetary Fund.
- Grootaert, C. (2003). Measuring social capital: An integrated questionnaire. Washington, DC.: World Bank Publications.
- Haridison, A. (2013). Modal sosial dalam pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 4, 31-40.
- Hasbullah, J. (2006). Social capital: Menuju keunggulan budaya manusia Indonesia: MR-United Press.
- Krishna, A., dan Shrader, E. (1999). Social capital assessment tool. Paper presented at the Conference on social capital and poverty reduction.
- Lee, Y., Rianti, I. P., Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest

- management. *Forest Science Technology*, 13(3), 133-141.  
doi:<http://dx.doi.org/10.1080/21580103.2017.1355335>, Diakses pada 05 September 2017.
- Leonard, P. (2020). Environmental and Social Management Framework (ESMF) ID: Strengthening of Social Forestry in Indonesia (P165742). In: The World Bank.
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G. Y., Brockhaus, M. (2017). Social Forestry-why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 78-97.  
doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>, Diakses pada 27 November 2017.
- Onyx, J., dan Bullen, P. (2000). Measuring social capital in five communities. *The journal of applied behavioral science*, 36(1), 23-42.
- Pambudi, A. S. (2020). The Development of Social Forestry in Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(1), 57-66.
- Putnam, R. D. (1995). Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America. *PS: Political science & politics*, 28(4), 664-683.
- Robinson, S., dan Stubberud, H. A. (2011). Social networks and entrepreneurial growth. *International Journal of Management Information Systems*, 15(4), 65-70.
- Saputro. 2012. Modal Sosial dan Persepsi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tesis Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.,
- Sardjono, M. A., Devung, S., Imang, N. 2013. Local Community Dimension of Indonesian Forest Policy and Customary Land Tenure in East Kalimantan. Paper presented at the Paper presented at the IASC conferences, Mount Fuji, Japan.
- Siscawati, M., Banjade, M. R., Liswanti, N., Herawati, T., Mwangi, E., Wulandari, C., . . . Silaya, T. (2017). Overview of forest tenure reforms in Indonesia (Vol. 223): CIFOR.
- Sylviani, S., Suka, A. P., Surati, S., Kurniasari, D. R. (2020). Social capital in managing community plantation forest: A case study at KPH Boalemo, Gorontalo Province. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 7(1), 71-82.
- Uphoff, N. (2000). Social Capital: A Multifaceted Perspective, . *Sociological Perspectives on Development series World Bank*.
- Westlund, H., dan Larsson, J. P. (2016). *Handbook of social capital and regional development*: Edward Elgar Publishing.